BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pokok pendidikan kita dewasa ini adalah peningkatan mutu pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikian. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan delapan standar nasional pendidikan yakni: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.[1] Standar nasional pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, pada hakekatnya menjadi arah dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, standar nasional pendidikan harus menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.[2]

Standar Nasional Pendidikan merupakan bagian dari amanat UU No. 20 Tahun 2003, yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan dan pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaianya

[1] PP. No. 19 Tahun 2005.
[2] Nana Sudjana, dkk, *Standar Mutu Pengawas*, (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan: Departemen Pendidikan Nasional, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.[3]

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran disekolah.[4]

Kualitas pendidikan yang mendasarkan kepada Standar Nasional Pendidikan menjadi bagian sebagai tujuan menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pengembangan kurikulum menurut pasal 35 UU No. 20 Tahun 2003, perlu dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan potensi daerah, dan peserta didik dan kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pendidikan, menurut Sukarno[5] merupakan bangunan sekaligus ihktiar yang sangat strategis, karena sistem pendidikan mengandaikan adanya pembagian kewenangan antara negara dan masyarakat dan tata-kelolanya yang meliputi pemeliharaan, kontrol, kreasi, adopsi dan distribusi nilai,

---

[3] Penjelasan PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan

[4] Jasmani , *Supervisi Pendidikan*,(Jogjakarta:Ar-Ruz Media,2013), hal.36.

[5] Sukarno, M , Refleksi Atas Beberapa Isu Kebijakan Pendidikan. Paper disampaikan pada Seminar Refleksi Akhir Tahun 2005 dengan tema ”Satu Tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono” diselenggarakan oleh Kedeputian IPSK-LIPI, Jakarta: Widya Graha Lt I, 13 Desember 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan, ketrampilan dan tata-hubungan kuasa. Oleh karena itu kebijakan pendidikan yang tepat pada umumnya harus secara struktural dapat memadukan daya masyarakat, negara dan dunia usaha secara tepat dan secara individual memicu mobilitas kultural, vertikal dan horisontal individu yang ketiganya pada gilirannya mengembangkan produktifitas budaya, sosial dan ekonomi sekaligus menuntut pengembangan habitat yang demokratis. Namun demikian, bila kebijakan yang diambil salah, upaya pendidikan dapat jatuh menjadi sekedar upaya mereproduksi tatanan dan struktur sosial, ekonomi dan politik lama dan memberikan bahan ajar materi didik, sistem pengelolaan dan akses pendidikan maupun peluang kerja yang tidak memadai dan tidak berkeadilan. Ketertinggalan struktural (tata hubungan kuasa) dan budaya (nilai, ilmu, teknologi dan tata-nilai hubungan kuasa), akan lebih mempersulit bagi upaya transisi menuju demokrasi dan upaya memenangkan kompetisi dari globalisasi.[6]

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan. Guna tercapainya tujuan pemerataan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia.

[6] Sukarno, M , Refleksi Atas Beberapa Isu Kebijakan Pendidikan.....13 Desember 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, haruslah ada yang menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan sehingga sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini pemerintah melakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Ketiga proses ini dilaksanakan untuk menentukan layak tidaknya lembaga pendidikan yang berstandar nasional.

Standar Nasional Pendidikan bertujuan bukan hanya untuk memeratakan standar mutu pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesi, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan perubahan lokal, nasional dan, global. Dikarenakan mutu pendidikan di Indonesia telah jauh tertinggal dari negara ASEAN yang lain, maka peningkatan-peningkatan di segi pendidikan akan terus terjadi. Sehingga mutu pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

Seperti halnya dengan MI Nurul Hidayah Krian Sidoarjo, berdiri sejak tahun 1984 sudah hampir 31 tahun MI ini berdiri tetapi sejak berdiri hingga sekarang masih mengikuti 4 kali akreditasi dan selama akreditasi yang pertama hingga keempat masih bertahan dengan akreditasi B.[7]

Sekolah yang ditengah kampung yang padat dan fasilitas atau sarana prasarana yang kurang memadai membuat sekolah ini sulit untuk berkembang mungkin juga tidak adanya pergantian kepala sekolah yang membuat kurang kreatifitas atau mindset yang bagus terhadap perkembangan sekolahnya. Pengawas yang datang ke sekolah ini juga hanya 1 semester 1 atau 2 kali saja .

[7] Data diambil dari wawancara kepala sekolah MI Nurul Hidayah Tropodo Krian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus menerus. Di sini, dibutuhkan kehadiran supervisor untuk mensupervisi semua persoalan yang muncul bagi guru dengan tujuan memberikan bantuan perbaikan-perbaikan dengan semestinya. Supervisor yang mampu memperbaiki keadaan itu adalah mereka yang berpengetahuan dan berwawasan luas terkait dengan supervisi pendidikan, memiliki keterampilan dan pengalaman, komitmen, berkinerja baik, bertanggung jawab menjalankan tugas dan fungsinya, dan profesional.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sebuah pengawasan/supervisi. Untuk memahami supervisi pendidikan perlu memahami supervisi itu sendiri. Supervisi mempunyai arti pengawasan. Sementara orang yang melakukan supervisi disebut supervisor atau pengawas. Supervisor atau pengawas dianggap jabatan yang secara ideal diduduki oleh seseorang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Kelebihan dan keunggulan bukan saja dari segi kedudukan, melainkan pula dari segi *skill* yang dipunyainya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memaksa semua pihak untuk terus mengadakan inovasi-inovasi dalam bidangnya, terlebih-lebih pada pengelola dan penanggung jawab pendidikan dalam hal ini termasuk pengawas satuan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan pengawas.

Pengawas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah (Kepmendikbud RI Nomor 020/U/1998 tanggal 6 Pebruari 1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya). [8]

Mendiknas juga telah memberikan rumusan tentang kompetensi Pengawas dan Kepala Sekolah/Madrasah, sebagai tenaga kependidikan. Rumusan lengkap kompetensi pengawas dan Kepala Sekolah/Madrasah tertuang dalam Permen Diknas nomor 12 dan 13 tahun 2007.[9]

Rumusan kompetensi pengawas dikelompokkan dalam lima dimensi, yaitu kompetensi : kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian pengembangan. Mengenai kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah juga dikelompokkan dalam lima dimensi kompetensi, yaitu kompetensi : kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Untuk kompetensi dosen dan kompetensi pendidik lainya masih sedang dikembangkan.[10]

Pengawas mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan tertentu dan sekaligus berfungsi sebagai mitra guru dan kepala sekolah, inovator, konselor, motivator,kolaborator, dan

---

[8] Jasmani ,Syaiful Mustofa, *Supervisi Pendidikan*,(Jogjakarta:Ar-Ruz Media,2013), hal.105.

[9] Tim Pengembang Imu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*,(Imperial Bhakti Utama,2007), hal.404.

[10] Tim Pengembang Imu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu....* , hal.404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asesor. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan sekolah adalah dengan melakukan pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi).

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan

Di daerah Krian sendiri terdapat 16 MI(Madrasah Ibtidaiyah), dari 16 Madrasah Ibtidaiyah ada 12 yang terakreditasi A, yang 1 terakreditasi B dan yang 3 MI belum terakreditasi karena terbilang Madrasah Ibtidaiyah baru saja berdiri. Di Krian ada 2 pengawas Madrasah Ibtidaiyah yang bernama Drs.Nuril Huda, M.pd dan Drs.Rachmat Isnuryanto.[11]

Drs.Rachmat Isnuryanto adalah salah satu pengawas yang ditugaskan di MI Nurul Hidayah. Menurut kepala sekolah MI Nurul Hidayah pengawas datang 1 semester 1x kadang juga 2x sesuai dengan kebutuhan sekolah.[12] Setiap bulan pembinaan yang dilakukan berbeda-beda sesuai dengan program yang dibuat pengawas. Pembinaan yang dilakukan seperti monitoring guru yang sertifikasi , monitoring kinerja kepala sekolah, pengecekan data-data sekolah, dll. Pada waktu akreditasi pengawas juga membimbing dan mengarahkan apa saja yang harus disiapkan untuk persiapan akreditasi , hal-

[11] Nur Hadziq , Ketua LPMWC NU Krian.
[12] Wawancara dengan Kepala Sekolah MI Nurul Hidayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal apa saja yang dibutuhkan untuk akreditasi. Pengawas juga mempunyai visi misi kepengawasan, dibawah ini visi misi kepengawasan.

VISI

TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN TERJANGKAU MELALUI OPTIMALISASI LAYANAN

MISI

1. Melakukan pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah
2. Mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah
3. Melakukan supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah
4. Meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan
5. Mengembangkan organisasi dan manajemen pengawas

Secara ideal pekerjaan supervisi pendidikan sangat baik dan mulia karena membantu sesama, tetapi dalam realitas lapangan, idealitas tersebut hilang. Supervisi yang ada di sekolah-sekolah dewasa ini lebih berkecenderungan melakukan *inspeksi* bukan *supervise*. Mereka berusaha melakukan dan mencari-cari kesalahan pegawai dan guru. Padahal Supervisor bukan polisi apalagi jaksa tetapi adalah pegawai yang diangkat dan dianggap cakap dalam bidang pendidikan.[13] Selain itu, ada juga pengawas yang jika berkunjung ke sekolah hanya masuk ke ruang kepala sekolah, sedangkan

[13] Jasmani , Syaiful Mustofa, *Supervisi Pendidikan*,(Jogjakarta:Ar-Ruz Media,2013), hal.17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertemu dengan para guru tidak dilakukan. Apakah dengan alasan tidak cukup waktu, karena sibuk, atau karena takut kalau ditanya guru tentang pembelajaran, atau bahkan takut karena diminta oleh guru untuk memberi contoh mengajar yang baik.[14]

Itulah di antara realitas yang terjadi. Mengapa hal tersebut terjadi, di antara sebabnya adalah salah penempatan. Para kepala sekolah atau guru yang akan pensiun biasanya mereka diletakkan dan di angkat sebagai pengawas. Jadi, jabatan pengawas bukan berdasarkan kualitas dan profesionalisasi, melainkan karena pertimbangan umur dan karena akan pensiun. Bahkan kakunya, kalau sudah tua atau akan pensiun mereka "diparkirkan" di jabatan supervisor (pengawas). Kebijakan dan anggapan yang salah seperti inilah yang menjadi latar belakang etos kerja para supervisor (pengawas) mandul dan salah kaprah. Maka tidak heran jika banyak pengawas yang takut masuk ke kelas dan bertemu guru karena mereka memang belum mampu untuk mengarahkan.

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi, "**DAMPAK KINERJA PENGAWAS TERHADAP PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HIDAYAH KECAMATAN KRIAN SIDOARJO "**

[14] Jasmani , Syaiful Mustofa , *Supervisi Pendidikan* , hal.18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah

1. Bagaimana Kinerja Pengawas di MI Nurul Hidayah Kecamatan Krian Sidoarjo ?
2. Bagaimana Pencapaian Standar Nasional Pendidikan di MI Nurul Hidayah Krian Sidoarjo?
3. Bagaimana Dampak Kinerja Pengawas terhadap Pencapaian Standar Nasional Pendidikan di MI Nurul Hidayah Krian Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Kinerja Pengawas di MI Nurul Hidayah Kecamatan Krian Sidoarjo ?
2. Untuk mengetahui Pencapaian Standar Nasional Pendidikan di MI Nurul Hidayah Krian Sidoarjo?
3. Untuk mengetahui Dampak Kinerja Pengawas terhadap Pencapaian Standar Nasional Pendidikan di MI Nurul Hidayah Krian Sidoarjo . “

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

   Penelitian tentang kinerja pengawas terhadap penerapan SNP diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis khususnya di Jurusan Kependidikan Islam Prodi Manajemen Pendidikan , sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan konsep pendidikan yang berhubungan dengan kajian minat masyarakat terhadap kepengawasan pendidikan

2. Secara praktis
   a. Sebagai informasi sekaligus masukan baik kepada ketua kelompok kerja pengawas (PokJawas) maupun kepada Kemenag Kabupaten Sidoarjo
   b. Bagi guru, sebagai masukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya.
   c. Bagi lembaga atau pihak sekolah, sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha peningkatan dan pengembangan sekolah secara lebih efektif dan efesien .
   d. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan konstribusi positif bagi peningkatan kinerja pengawas dalam menyiapkan sistem kinerja kepengawasan yang berkualitas.

E. Definisi Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami judul skripsi "DAMPAK KINERJA PENGAWAS TERHADAP PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HIDAYAH KRIAN SIDOARJO" maka perlu kiranya penulis menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul tersebut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dampak

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh se-seorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Pengertian dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang / benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

2. Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kinerja adalah Sesuatu yg dicapai, prestasi yg diperlihatkan, kemampuan kerja. Menurut peneliti Kinerja adalah Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu instansi/dinas di lingkungannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya pencapaian tujuannya secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika.

3. Pengawas

Pengawas adalah jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan dalam upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan proses dan hasil belajar guna mencapai tujuan pendidikan.

Pengawas sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah dasar dan menengah.

4. Pencapaian

Pencapaian merupakan proses, cara, perbuatan mencapai. Proses atau cara seseorang untuk mecapai sesuatu yang diinginkan. Menurut peneliti sendiri pencapaian yakni proses dalam mencapai sesuatu yang telah direncanakan.

5. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan. Guna tercapainya tujuan pemerataan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia. Sesuai dengan 8 Standar Nasional Pendidikan yakni Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tinjauan Pustaka Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian yang berkaitan dengan pengawas madrasah dan Standar Nasional Pendidikan ini bukanlah penelitian yang pertama kali. Artinya banyak peneliti lain yang telah mengambil inti permasalahan yang sama, baik dituangkan ke dalam karya penelitian skripsi, tesis, maupun karya-karya ilmiah yang lain. Untuk memperkuat kerangka penelitian peneliti mempelajari terlebih dahulu karya penelitian terdahulu yaitu antara lain :

NO	NAMA	TAHUN	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAN	PERBEDAAN
1.	Ismu	2010	Implementasi Standar Nasional Pendidikan di SMA Negeri 3 Tegal	Menunjukan bahwa program penerapan standar nasional pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Tegal adalah program nasional yang difokuskan pada pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan.kualitas	Sama sama membahas tentang penerapan Standar Nasional Pendidikan	Penelitian saya lebih kepada kinerja pengawas dalam penerapan Standara Nasional Pendidikan. Kalo Penelitian Ismu lebih kepada Implementasi 8 Standar Nasional di SMA Negeri Tegal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				keterlaksanaan program di SMA Negeri 3 Kota Tegal		
2.	Afifah Awaliyah	2010	Persepsi guru tentang kinerja pengawas dalam melaksanakan supervisi Standar Proses di SMP N 87 Jakarta	Mengetahui kinerja pengawas dalam melaksanakan supervisi Satandar Proses yaitu sebagai Koordinator, Konsultan, Pemimpin kelompok, dan evalutor	Sama sama membahas tentang penerapan Standar Nasional Pendidikan	Penelitian saya lebih kepada kinerja pengawas dalam penerapan Standara Nasional Pendidikan Kalo Penelitian Awaliyah hanya standar proses.
3.	Susi Susilawati Harahap	2009	Pengaruh Penerapan Standar Nasional Pendidikan Terhadap Kesempatan Kerja Lulusan Siswa Smk	Kualifikasi akademik guru yang mengajar di SMK Negeri di Kota Medan masih belum seluruhnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sedangkan kurikulum dan	Sama sama membahas tentang penerapan Standar Nasional Pendidikan	Penelitian saya lebih kepada kinerja pengawas dalam penerapan Standara Nasional Pendidikan Tesis di atas lebih kepada kesempatan kerja lulusan SMK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Negeri Di Kota Medan	sarana dan prasarana telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan		
4.	Asyhari	2011	Supervisi Akademik Pengawas Madrasah Tsanawiyah di kabupaten Jepara	Supervisi akademik Pengawas Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Jepara dilakukan dengan memenuhi standar prosedural dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan menggunakan seperangkat instrumen yang diperlukan serta dilakukan	Sama sama membahas tentang penerapan Standar Nasional Pendidikan	Penelitian saya lebih kepada kinerja pengawas dalam penerapan Standara Nasional Pendidikan Tesis di atas lebih kepada Supervisi Akademik pengawas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				dengan cara-cara modern, meninggalkan cara konvensional-tradisional		

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pemahaman dan pemecahan masalah secara lebih terstruktur dan sistematis, maka penulis menyusun suatu bentuk penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujauan penelitian, kegunaan penelitian, definisi konseptual, tinjauan pustaka terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini merupakan kajian teori-teori. Teori-teori yang digunakan dalam bab ini adalah teori tentang kinerja pengawas, tugas pokok pengawas, fungsi pengawas, tanggung jawab pengawas, standar kualifikasi pengawas, standar kompetensi pengawas, dan pencapaian 8 standar nasional pendidikan, dan dampak kinerja terhadap pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

BAB III Bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, informan penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV Bab ini menjelaskan tentang Penyajian Data Dan Teknik Analisa Data yang meliputi; penyajian data yang terdiri dari: gambaran umum, penyajian data tentang kinerja pengawas dalam pencapaian Standar Nsional Pendidikan di MI Nurul Hidayah.

BAB V Bab ini merupakan bab penutup, sebagai bab penutup berisi simpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id